

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu sasaran yang ingin diperoleh oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang. Pengembangan ekonomi dilakukan untuk memperbaiki keadaan perekonomian, agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran tersebut, salah satunya adalah upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai situasi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pakaian, pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan Ali Mauludi AC *et al.*, (2023).

Kemiskinan merupakan isu yang terus menjadi perdebatan dalam berbagai diskusi mengenai ekonomi dan kebijakan publik. Sampai sekarang, kemiskinan tetap merupakan salah satu isu paling signifikan yang dihadapi oleh seluruh dunia. Sayangnya, setelah berhasil mencapai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan justru kembali naik akibat dampak Pandemi Covid-19 (Rositawati & Kurniawan, 2022). Pandemi ini memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang mengakibatkan pembatasan aktivitas warga. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini sangat signifikan. Di antara beberapa faktor, terdapat jumlah pekerja yang diberhentikan sebagai langkah untuk mengurangi biaya perusahaan serta penurunan aktivitas jual-beli di masyarakat yang berdampak pada penyusutan ekonomi masyarakat (Praja, *et al.* 2023).

Sebagai hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena yang sama juga terjadi di sejumlah tempat lain di dunia. Setiap wilayah di Indonesia, baik yang merupakan provinsi besar ataupun yang masih dalam proses pengembangan, pasti memiliki sejumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin. Akan tetapi, setiap provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang bervariasi.

Isu kemiskinan di Indonesia tidak hanya muncul di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, tetapi juga masih ada di wilayah ibu kota. Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota negara, masih menghadapi masalah kemiskinan di dalamnya.

Grafik 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berdasarkan grafik 1.1 di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 10,14%, sedangkan pada tahun 2023 persentase tersebut menurun menjadi 9,36%. Ini jelas menunjukkan keberhasilan pemerintah pusat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada penurunan, rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023 masih tergolong tinggi, yakni di atas 10%.

Penerapan sistem Otonomi Daerah yang berdasarkan pada UU nomor 32 tahun 2004, yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengatasi, atau minimal mengurangi, permasalahan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri tentu menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah. Mereka diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong kemajuan daerah dan membawa perkembangan yang lebih baik lagi. Sebab apapun yang terjadi, pihak yang paling memahami situasi dan tantangan di suatu daerah adalah pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kebijakan yang efisien guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan di tingkat lokal.

Grafik 1. 2 Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2018 hingga 2023 mengalami kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2018, persentase kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,57%, dan kemudian meningkat menjadi 4,44% pada tahun 2023. Secara umum, diperoleh rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2018 hingga 2023 sebesar 4,23%.

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam bidang ekonomi, di mana isu ini masih menjadi “tugas yang belum tuntas” untuk diatasi. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengatasi kemiskinan berada di tangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai Ibukota republik, pusat aktivitas ekonomi,

pusat pemerintahan, serta tempat tinggal bagi para perwakilan negara-negara sahabat. Provinsi DKI Jakarta memiliki populasi yang besar, terdiri dari berbagai suku dan budaya, serta menghadapi beragam masalah yang kompleks.

Namun, terlihat bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian, DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Di samping itu, walaupun pendapatan per individu di DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi di seluruh Indonesia, garis kemiskinan di DKI Jakarta menempati posisi ketiga tertinggi di negara ini (Praja *et al.*, 2023). Ini berarti bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar demi mendapatkan kehidupan yang layak di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Dua faktor tersebut membuat DKI Jakarta memiliki tingkat kompleksitas yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan.

Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Grafik 1. 4 Total Penduduk Miskin DKI Jakarta 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

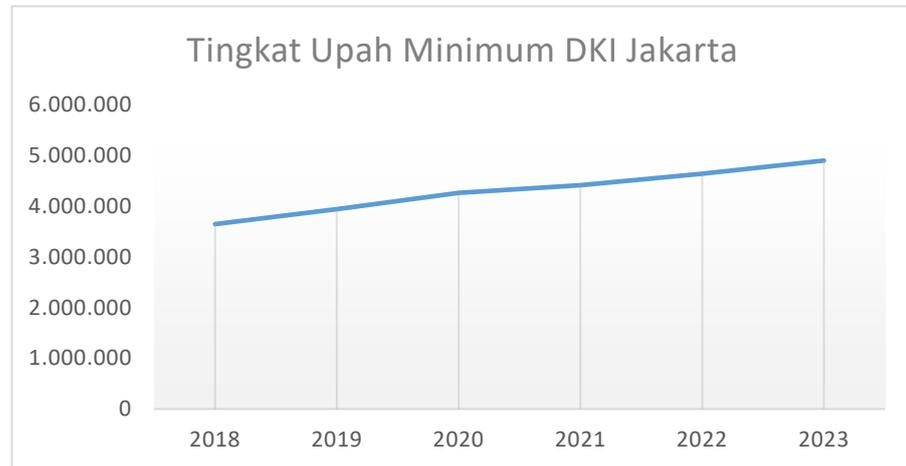
Grafik 1.3 menunjukkan perbandingan jumlah warga miskin di wilayah Kabupaten/Kota DKI Jakarta selama periode 2018 hingga 2023. Jumlah populasi miskin yang paling besar berada di wilayah Kota Jakarta Utara selama periode 2018 hingga 2023. Kepulauan Seribu merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah di DKI Jakarta selama periode 2018 hingga 2023.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemakmuran atau kesejahteraan suatu komunitas adalah tingkat pendapatan yang mereka miliki. Pendapatan masyarakat akan mencapai puncaknya ketika kondisi penggunaan tenaga kerja secara optimal atau penuh dapat tercapai. Tingkat pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan yang telah berhasil dicapai. Penurunan tingkat kesejahteraan akan menyebabkan timbulnya masalah lain, yaitu kemiskinan.

Saat pendapatan mengalami penurunan atau stagnasi, maka kesejahteraan pun akan mengalami penurunan atau stagnasi, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, konsep upah minimum diharapkan dapat memastikan pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja beserta keluarga mereka, sekaligus bisa mendorong

peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan para buruh (Mangasi Panjaitan, 2020).

Grafik 1. 5 Tingkat Upah Minimum DKI Jakarta Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Grafik 1.4 Mengindikasikan bahwa hingga tahun 2023, besaran upah minimum provinsi, terutama di Provinsi DKI Jakarta, terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Upah minimum telah ditetapkan di atas tiga juta rupiah.

Saat tingkat pembangunan manusia rendah, hal ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas kerja masyarakat. Ketika pendapatan berada pada tingkat yang rendah, hal itu akan berkontribusi pada meningkatnya jumlah populasi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga berperan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan. Saat individu tidak memiliki sumber daya tersebut, mereka akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan daya beli. Hal ini dapat mengarah pada terjebaknya mereka dalam siklus kemiskinan. Tenaga kerja tentunya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada gilirannya akan memengaruhi angka pengangguran (Mangasi Panjaitan, 2020).

Grafik 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Tahun 2018-2023

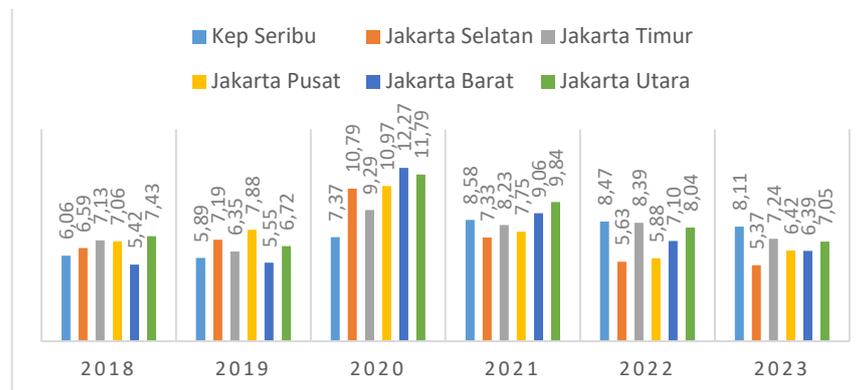


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dapat dilihat pada grafik 1. 5 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan nilai IPM mencapai 80,47 pada tahun 2018. Kenaikan terus berlanjut pada tahun berikutnya, yaitu 2019 dengan angka 80,76, dan pada tahun 2020 mencapai 80,77. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 81,11. Selanjutnya, antara tahun 2022 hingga 2023, IPM mengalami kenaikan yang signifikan, dengan nilai mencapai antara 81,65 hingga 82,46.

Selain faktor indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Pengangguran adalah isu demografis yang sangat terkait dengan kemiskinan. Peningkatan jumlah angkatan kerja baru yang terjadi setiap tahun menjadi salah satu faktor penyebab munculnya pengangguran, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan. Tingginya tingkat pengangguran dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan berpotensi memicu timbulnya kemiskinan. Meningkatnya jumlah individu dalam usia produktif juga berkontribusi pada pertumbuhan angka pengangguran di DKI Jakarta.

Grafik 1. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2024

Grafik 1. 8 Total Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik 6 tahun

Grafik 1.6 menunjukkan persentase tingkat pengangguran yang dilaporkan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta periode 2018-2023. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2023 adalah Kepulauan Seribu sebesar 8,11%, disusul Jakarta Timur dan Jakarta Utara masing-masing sebesar 7,24% dan 7,05%. Tingkat pengangguran terbuka terendah terdapat di Jakarta Barat. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2018-2023 terjadi pada tahun 2020 sebesar 12,27% di wilayah Jakarta Barat, dan tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kepulauan Seribu sebesar 7,37%. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan sebesar 6,53%.

Grafik 1. 9 Tingkat PDRB Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Grafik 1. 10 Total Tingkat PDRB Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2024

Angka PDRB mencerminkan tingkat kemajuan setiap daerah. Selama periode 2018-2023, DKI Jakarta menunjukkan nilai PDRB yang relatif tinggi. Akan tetapi, DKI Jakarta masih terjebak dalam isu kemiskinan. Untuk menangani atau menekan kemiskinan, diperlukan kebijakan yang efektif untuk mengubah pola pertumbuhan populasi, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang tidak sejalan dengan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan yang adil. Salah satu tanda keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang bisa digunakan sebagai

ukuran secara makro adalah peningkatan ekonomi yang terlihat dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Provinsi DKI Jakarta mengalami tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Apabila proses urbanisasi tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini akan berdampak buruk pada perekonomian penduduk. Apabila proses urbanisasi berjalan tanpa pengawasan, hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Perkembangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta berlangsung dengan cepat, namun jika tidak diimbangi dengan distribusi yang merata di setiap sektor wilayah, hal ini bisa mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Perkembangan ekonomi suatu kawasan merujuk pada kenaikan hasil dari segala aktivitas ekonomi yang terjadi di seluruh sektor dalam satu wilayah. Hal ini biasanya diidentikkan dengan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB tersebut akan berpengaruh besar terhadap kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Secara logis, jika PDRB mengalami peningkatan, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat secara otomatis dan dengan adanya kenaikan pendapatan per kapita, dipastikan bahwa tingkat konsumsi juga akan bertambah, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan tingkat kesejahteraan (Sania, *et al.*, 2021).

Sebagai ukuran untuk menilai jumlah nilai tambah di suatu daerah, PDRB juga dapat berfungsi sebagai indikator tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Daerah yang semakin makmur akan mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup yang memadai. Kawasan yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi akan berusaha untuk memperbaiki kualitas serta jumlah di berbagai sektor, terutama dalam hal kebutuhan dasar. Berdasarkan hal itu, peningkatan nilai PDRB akan berdampak pada tingginya nilai IPM.

Berdasarkan penjelasan data di atas, terlihat bahwa Upah Minimum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Terdapat Indeks Pembangunan Manusia yang relatif tinggi dan terus menunjukkan

peningkatan antara tahun 2018 dan 2023. PDRB di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Tidak seperti yang diharapkan, Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dan isu kemiskinan tetap menjadi tantangan serius di wilayah ini antara tahun 2018 hingga 2023.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DKI JAKARTA PERIODE 2018-2023.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu yang terkait dengan penelitian ini. Masalah itu dikenali dengan cara berikut:

1. Isu kemiskinan di Indonesia tidak hanya muncul di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, tetapi juga masih ada di wilayah ibu kota. Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota negara, masih menghadapi masalah kemiskinan di dalamnya.
2. Peningkatan angka pengangguran terbuka akan mengakibatkan penurunan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan, sehingga akses terhadap kehidupan yang layak, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan akan mengalami penurunan.
3. Perubahan UMP seiring berjalannya waktu akan berdampak pada peningkatan penghasilan. Oleh karena itu, situasi ini bisa berdampak pada kemampuan pekerja untuk meningkatkan pengeluarannya.
4. Kenaikan nilai indeks pembangunan manusia mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sumber daya manusia berperan sebagai baik pelaku maupun sasaran dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan bahwa orang tidak hanya terlibat dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga menjadi target dari upaya pembangunan tersebut.
5. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran makro dalam salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut, baik berdasarkan harga yang berlaku maupun harga tetap.

C. Batasan Masalah

Menurut penjelasan yang terdapat dalam latar belakang dan identifikasi masalah, ada beberapa isu yang perlu diteliti dengan lebih mendalam. Untuk menjaga agar bahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan, peneliti mengarahkan penelitian ini hanya pada topik upah minimum provinsi, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2018 hingga 2023.

Penelitian mengenai pengaruh upah minimum, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka serta PDRB sangat berpengaruh pada sektor perekonomian disuatu daerah. Faktor upah minimum, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka serta PDRB menjadi fokus utama dalam penelitian ini guna untuk melihat bagaimana pengaruhnya secara keseluruhan terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Upah Minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto) atas dasar harga konstan berpengaruh secara bersama – sama terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023
- 2) Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.
- 3) Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.
- 4) Menganalisis pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.
- 5) Menganalisis pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan berpengaruh secara bersama – sama terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan untuk menganalisis dampak dari upah minimum, tingkat pengangguran terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

- 1) Untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan studi lainnya serta memperluas pengetahuan mengenai penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan di DKI Jakarta.

- 2) Untuk pemerintah atau pihak yang membuat kebijakan, studi ini bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman mengenai persoalan kemiskinan di DKI Jakarta.
- 3) Untuk penulis, penelitian ini adalah proyek akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di bidang ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka peneliti membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup bahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Berisi tentang teori dasar yang mendasari pada penelitian Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian terdiri dari pembahasan obyek penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengkaji tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V : PENUTUP

Mengkaji tentang pernyataan sederhana berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian, serta saran atau rekomendasi yang urgen.